BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tinjauan umum tentang Kota Subang

3.1.1 Sejarah Kota Subang

Kabupaten Subang terletak pada bagian utara wilayah Provinsi Jawa Barat luas wilayah 205.176,95 Ha yang terletak antara 107^0 31'- 107^0 54' BT dan 6^0 11'-6^0 49' LS.

Sebagaian dari wilayah kabupaten merupakan kawasan pengembangan Bandung Raya. Subang merupakan salah satu kawasan andalan Jawa Barat yaitu kawasan PURWASUKA (Purwakarta, Subang, Karawang), secara topologi wilayah Kabupaten Subang dapat menjad 3 zona wilayah pegunungan, dataran, dan pantai yang mempunyai ketinggian bervariasi antara 0-1700 dpl (di atas permukaan laut).

Kabupaten Subang secara administratif terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang tergabung dalam 22 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukkan Wilayah Kerja Camat, jumlah kecamatan bertambah menjadi 30 kecamatan.

Kabupaten Subang memiliki rangkaian peristiwa bersejarah sama halnya dengan daerah-daerah lainnya. Dengan banyaknya ditemukan benda-benda sejarah peninggalan zaman *neolithicum* (Zaman Batu Muda) salah satunya ditemukannya kapak persegi, hal ini memberikan gambaran adanya kehidupan manusia purba di daerah Subang pada saat itu.

Masa perkembangan hindu di Subang dibuktikan dengan ditemukan arca Nandi di Kampong Slaawi, Desa Cipanca, Kecamatan Sagalaherang. Hal ini membuktikan kawasan selatan subang yang menghubungkan Kerajaan Galuh dan Padjajaran yaitu jalur Sagala Herang-Tanjung Siang.

Perkembangan Islam di Wilayah subang berkembang pesat setelah kedatangan wangsa Goparana di Sagala Herang. Wangsa Goparana adalah seorang ksatria yang berasal dari Talaga yang bercorak Hindu. Goparana memiliki belajar dan berguru kepada Sunan Gunung Jati sekaligus membantu menyebarkan ajaran Islam di tatar Pasundan.

Bermula dari Sagala Herang ia mulai menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah subang sampai daerah-daerah seperti Purwakarta, Cianjur, Sukabumi dan Limbangan, selain berhasil menyebarkan ajaran Islam wangsa Goparana dikenal juga sebagai tokoh yang telah menurunkan demang-demang pada masa P & T Lands dan Bupati di Cikundul, Cianjur.

Masa partikelir bukan hanya pendatang pribumi yang tertarik dengan kesuburan wilayah Subang para planters dari Belanda pun berdatangan dan membuka perkebunan di wilayah subang yang terkenal adalah pusat perkebunan tanah partikelir Pamanukan dan Tjiasem Lands (P & T Lands).

P & T Lands dibangun oleh Peter Wilem Hofland bersaudara pada tahun 1850 yang berpusat di gedung wisma Karya sekarang dalam masa tersebut menunjukan kejayaan perkebunan di wilayah Subang sampai pada akhirnya terbentuk pemukiman baru yang disebut Subang.

Tepat pada tanggal 1 Maret 1942, komandan armada pendaratan Jepang untuk pulau Jawa, mendaratkan pasukannya dalam waktu bersamaan di empat pertahanannya. Daerah-daerah itu adalah Merak, Teluk Banten, Eretan Wetan dan Kranggan. Tentara Jepang yang mendarat di Eretan Wetan merupakan tentara yang dipimpin Kolonen Shoji yang tugas utamanya menggempur pangkalan udara Kalijati dan menduduki Subang. Kedatangannya membuat panik warga dan tentara Hindia-Belanda.

Dalam waktu yang singkat Kalijati jatuh kepada tentara Jepang tanpa perlawanan yang berarti, dengan menguasai Subang dan sekitarnya tentara Jepang menjadikan bekas pusat perkebunan P & T Lands sebagai markas besarnya. Pada tahun 1942 terjadi pertempuran di Ciater antara Hindia-Belanda dan tentara Jepang. Pertempuran tersebut merupakan perlawanan pertama kalinya sejak tentara belanda dipukul mundur dari Subang.

Pada tanggal 7 Maret 1942 konfrontasi fisik antara kedua belah pihak sepakat untuk dihentikan, proses selanjutnya adalah upaya mengadakan perundingan di Kalijati yang dilaksanakan pada tanggal 8 maret 1942 dari pihak tentara Jepang diwakili oleh Panglima Imamura, sedangkan dari wakil pemerintahan Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Jendral Tjarda dan Letnan Jendral Ter Poorten.

Immamura mendesak pemerintahan Hindia Belanda untuk secepatnya menandatangani piagam penyerahan wilayah pendudukan tanpa syarat, naskah yang harus ditandatangani ini telah disiapkan oleh tentara Jepang. Apabila pemerintah Hindia Belanda menolak menandatangani naskah

perjanjian ini maka tentara Jepang akan membombardir pusat pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Jenderal Ter Poorten memilih menandatangai Piagam penyerahan pendudukan tanpa syarat.

3.1.2 Lambang Kabupaten Subang

Gambar 3.1

Lambang Kabupaten Subang



Sumber : Arsip pemerintah Kabupaten Subang 2011

Maksud dan arti lambang Kabupaten Subang

Bentuk perisai yang bersudut lima, melukiskan “Perlindungan Keselamatan Negara Bangsa, Agama, Masyarakat dan Keluarga”.

a) Pohon beringin yang bergelombang 17 dan berakar tunjang delapan berdasarkan benteng berkepala lima, berbata “empat dan lima” melambangkan:
    - Historis Kabupaten Subang (KUTAWARINGIN)
    - Pemerintah sebagai pelindung rakyat
    - Pemerintah daerah baik material maupun Spiritual

b) Gambar yang dipakai landasan pohon beringin adalah **gambar benteng** berkepala lima melambangkan Pancasila sebagai Landasan Idil dan batas-batasnya bersusunan empat (di atas) dan Lima (di bawah) adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan pula sebagai lambang "Pembangunan Material dan Spiritual"

c) **Bintang Kuning bersudut lima** di bagian atas, meluksikan bahwa masyarakat Kabupaten Subang selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengagungkan agama.

d) **Kata-Kata**

- "**Benteng Pancasila"** menegaskan masyarakat Kabupaten Subang untuk membentengi (menjaga atau menegaskan) Pancasila sebagai landasan Idil Negara dari rongrongan pihak manapun yang akan menyelewengkannya, selain itu masyarakat Kabupaten Subang berketetapan menjadi adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan kenyataan yang menjadi catatan penting dan bersejarah bagi warga masyarakat Kabupaten Subang bahwa Kabupaten Subang telah berhasil keluar sebagai juara pertama perlombaan semangan unggul Pancasila tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh KODAM SILIWANGI pada tahun 1969.
- "**Karya Utama Satya Negara",** mengutamakan karya (pekerja) untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama.

- Maksud dan Tujuan Arti Warna :
    - **Warna Kuning Mas** yang dipakai dalam pinggiran perisai, seluruh pinggiran pohon beringin, pada garis benteng atau bata dan bintang di atas keluruhan budi, kebesaran jiwa.
    - **Warna Hijau Tua,** yang dipakai warna lambang, melambangkan kesuburan daerah.
    - **Warna Cokelat** melambangkan daerah pedataran.
    - **Hijau Muda** melambangkan daerah pegunungan, dan
    - **Biru** melambangkan daerah pantai.

3.1.3 Visi, Misi, dan Motto Kabupaten Subang

3.1.3.1 Visi

Arah pembangunan daerah diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekonomi kerakyatan seperti: pengembangan agribisnis, pengembangan industri dan pengembangan pariwisata.

Arah kebijakan tersebut didukung oleh peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur yang berkualitas, rehabilitas dan konservasi lingkungan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan berwibawa.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka Visi Kabupaten Subang

“Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata, Industri yang Berawawasan Lingkungan dan Religius Serta Berbudaya Melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2025”.

Dicapai dalam tahap kedua ini dengan formulasi visi sebagai berikut: “Terwujudnya Subang sebagai Kabupaten yang Berbasis Gotong Royong”.

3.1.3.2 Misi

Merupakan penjabaran dari visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih. Adapun rumusan misi merupakan formulasi misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) rancangan bupati terpilih sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa

Misi Kedua : Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan

Misi Ketiga : Mewujudkan prasarana wilayah yang berkualitas

Misi Keempat : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari

Misi kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1.1.3.3 Moto

Subang Berseri Perda No. 7/1987 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3):

- Bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran.
- Sehat merupakan keadaan atau kondisi baik lingkungan atau juga fisik orang, bebas dari penyakit jasmani maupun rohani.
- Rapih adalah keadaan atau lingkungan yang tertata dengan apik, baik dan artistik sehingga mempunyai daya tarik untuk dilihat.
- Indah yaitu suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik sedap dipandang. Indah dapat dipandang dari berbagai segi, seperti dari segi warna, tata letak, tata ruang bentuk atau gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat.

3.2 Tinjauan tentang Tempat Penelitian

3.2.1 Sejarah Humas Sekretariat Kabupaten Subang

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Subang merupakan daerah kewedanaan yang ada di bawah Kabupaten Karawang, dengan kedudukan di Purwakarta, keadaan ini berlangsung sampai 5 April 1948. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan hari jadi Kabupaten Subang. Awal 1946, Subang dijadikan tempat kedudukan, Residen Jakarta setelah meletus Agresi Belanda I pada 20 Juli 1947 Subang diduduki Belanda dan pemerintahan mundur ke

Bakom, Songgom, Suriam, Cikadu, pada tanggal 5 April 1948 di Cimanggu dibentuk kabupaten Karawang Timur, dengan bupati pertamanya Dana Ganda Wikama.

Pada 29 Januari 1949, wali Negara Pasundan memecah Kabupaten Karawang menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kewedanaan Karawang, Rengasdengklok, Cikampek dan Purwakarta yang meliputi Kewedayaan Purwakarta, Subang, Pamanukan, Ciasem dan Sagalaherang.

Dengan demikian antara 29 Januari 1949 – 8 Agustus 1950, terdapat dualisme pemerintahan kabupaten di daerah Kabupaten Subang sekarang yakni pemerintahan Kabupaten Karawang Timur dengan Bupati R.S Ronggowaluyo dan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dengan Bupati R. Hasan Suriasacakusumah untuk mengatasinya, pada Januari 1950, di Kabupaten Karawang Timur dibentuk pemerintahan dengan nama Badan Pekerja Darurat Kabupaten Karawang, yang ketuanya dijabat Bupati Karawang Timur, R. S. Sunarya Ronggowaluyo, sedangkan bupati militernya dijabat Rd. R.S Hadipranoto. Pemerintah ini di bawah Residen Jakarta, yang waktu itu dijabat M. Mu’min.

Berdasarkan Peraturan Pemerinath No. 10 tahun 1950, badan pekerja darurat Kabupaten Karawang Timur dibubarkan, atas dasar keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 4/UH/GDB/50 tertanggal 2 Juni 1950, diangkat seorang pejabat bupati, yakni Rd. R.S Hadipranoto sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatifnya dipegang oleh Mu’min.

Bupati pertama setelah pernyataan kedaulatan atau ketiga dihitung dari Kabupaten Karawang Timur, Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Subang yaitu Rd. R.S Hadipranoto yang merangkap sebagai ketua dewan pemerintah daerah. Bupati pertama dari Rengasdengklok dan memegang peran penting ketika Bung Karno dan Bung Hatta disembunyikan Singgih dan Chairul Saleh dengan kawan-kawannya di Rengasdengklok menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada 1957, lahir Undang-Undang No 1 Tahun 1957 yakni Undang-Undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah, yang diantaranya mengatur Pemerintahan Daerah tingkat II sepenuhnya berada di bawah pimpinan kepala daerah yang dipilih DPRD. Terpilih kemudian R. Gandawijaya dari unsur PNI. Dengan demikian kedudukan bupati dihapus, dan Rd. R.S Hadipranoto ditarik ke Departemen Dalam Negeri. Perwakilan pemerintahan pusat didaerah dilaksanakan Kepala Pamong Praja yang dijabat oleh Raja Patih dengan Sebutan Pejabat Bupati. Untuk jabatan tersebut diangkat Tubagus Chasan Sutawinangun, yang jabatan asalnya patih di kantor Keresidenan Purwakarta. Undang-Undang No.1 Tahun 1957 Tentang Pokok Pemerintah Daerah dicabut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-undang tersebut digantikan dengan Ketetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 yang membubarkan DPR dan DPRD-DPRD hasil pemilu 1959 dan membentuk DPRGR dan DPRDGR. Jabatan Bupati dihidupkan lagi, yang merangkap sebagai Kepada Daerah dan merangkap pula sebagai Ketua DPRDGR Kabupaten Daerah Tingkat II.

Pada akhir 1966 habis masa jabatan Bupati TB. MH. Chassan Sutawninangun sebagi Bupati Kabupaten Purwakarta. Maka diadakan pemilihan dan secara aklimasi R.A. Syamsudin yang semula Kasdim 00605 Subang atau Purwakarta menjadi Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Subang. Pelantikannya dilakukan 25 Januari 1967, sedangkan yang digantikan menjadi Residen atau Pembantu Gubernur untuk wilayah banten di Serang.

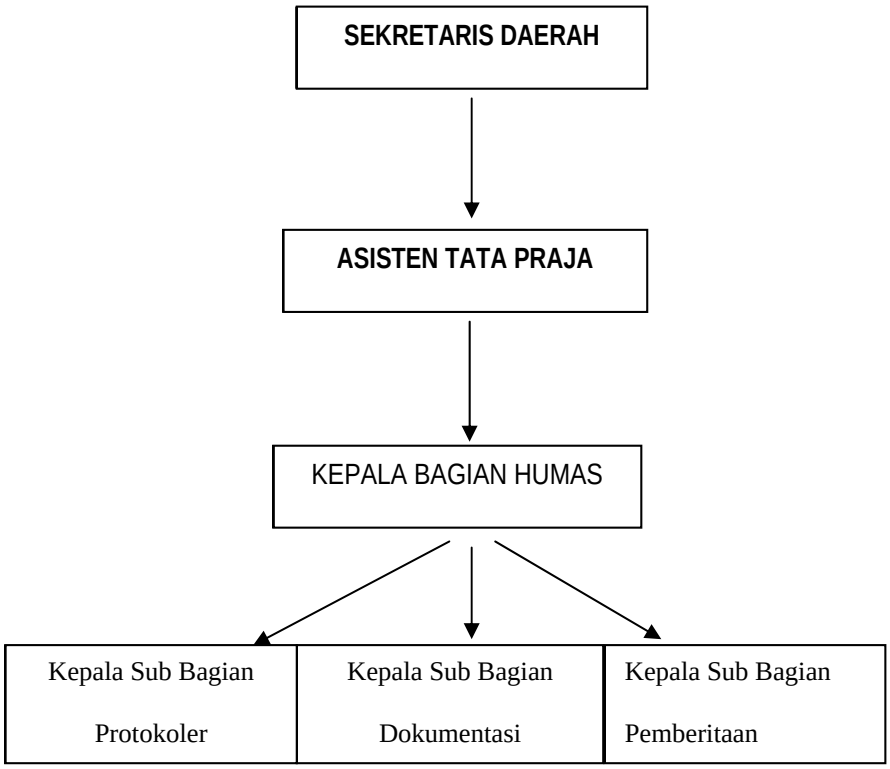
Pada 29 Juni 1968 dikeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1968 yang membagi Kabupaten Purwakarta menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dan Kabupaten Subang di Subang. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang tersebut R.A Syamsudin otomatis menjadi Bupati Daerah Kabupaten Subang.

Pada 1973 secara aklamsi R.A Syamsudin terpilih kembali. Ketika masa jabatannya berakhir 1978, diadakan pemilihan bupati kepada daerah. Di antara tiga calon, yakni Muhammad Amin, Ir. Sukanda Kartasasmita, dan Drs. Saleh, terpilih Ir. Sukanda Kartasasmita. Pelantikannya dilakukan pada 21 November 1978.

Dengan demikian, hingga 1990-an sampai saat ini terbentuklah suatu pemerintahan Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Bupati pertamanya Ir. Sukanda Kartasasmita.

3.2.2 Susunan Struktur Organisasi Humas Sekretariat Kabupaten Subang

Tabel 3.1
Susunan Struktur Organisasi Bagian Humas Setda
Kabupaten Subang Perda: No. 13 Tahun 2002



Sumber: Arsip Humas Pemkab Subang, 2011

3.2.3 *Job Description* Humas Sekretariat Kabupaten Subang

Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Subang. Berdasarkan PP No.41 Tahun 2007.

Kabag Humas dan Protokol.

Tugas pokok :

Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah.

1. FUNGSI:
    a. Penyusunan program kerja di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    b. Penyusun petunjuk teknis dan bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
    c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
    d. Pelaksanaan hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk penjelasan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah;
    e. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan;
    f. Penyiapan agenda protokoler pimpinan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal kegiatan;
    g. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian palaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
    h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
    i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol.

Kepala Sub Bagian Protokol

Tugas pokok :

Menyiapkan agenda protokoler pimpinan daerah dan pelayanan kepada tamu pemerintah daerah;

1. Fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang protokol
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan protokoler pimpinan pemerintah daerah;
c. penyusunan acara dan pengurusan administrasi perjalanan dinas pemimpin pemerintah daerah;
d. pemberian pelayanan kepada tamu pemerintah daerah;
e. persiapan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dinas dan pertemuan lainya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan mempersiapkan upacara rutin dan keprotokolan lainnya;
f. pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan di bidang protokol;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi

Tugas pokok:

Mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan kebijakan pimpinan dan hasil kegiatan pemerintah daerah;

1. Fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang dokumentasi;
b. Pengumpulan dan pengolahan data kebijakan dan hasil kegiatan pemerintah daerah;
c. Pendokumentasian kebijakan dan hasil kegiatan pemerintah daerah;
d. Pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan dibidang dokumentasi;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait daam rangka pelaksanaan tugas;
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan perekaman hasil pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan tugas penata-usaha;
i. Pendistribusian bahan-bahan pemberitaan.

Kepala Sub Bagian Pemberitaan

Tugas pokok

Melakukan pemberitaan, penerangan dan penyebarluasan segala kegiatan program dan hasil pembangunan yang dicapai pemerintah daerah kepada masyarakat luas guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintah daerah, baik melalui media cetak, media elektornik serta mendistribusikan bahan-bahan.

1. Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberitaan;

b. Pengumpulan dan pengolahan data penerangan dan publikasi sebagai bahan penyajian media cetak dan media elektronik
c. Penyebarluasan bahan berita baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintah daerah.
d. Pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.
e. Pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kegiatan pemberitaan
f. Pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pemberitaan
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.